ANALISIS SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN PEDESAAN DI PROVINSI RIAU

Yusbar Yusuf, Tri Sukirno Putro, dan Wahyu Hamidi
Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRACT

Pembangunan Desa harus mampu meningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Peningkatan pembangunan pedesaan tidak cukup didorong melalui kapitalisasi akumulasi modal yang masuk ke pedesaan, namun harus diiringi dengan pemberdayaan masyarakat desa. Meningkatnya perhatian pemerintah melalui meningkatnya anggaran pembangunan desa diharapkan akan membawa perbaikan dalam peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk (i) Mengetahui perkembangan pembangunan sosial pedesaan di Provinsi Riau, (ii) Mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi pedesaan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis aspek sosial meliputi indikator pendidikan dan kesehatan, sedangkan aspek ekonomi meliputi indikator konsumsi dan pengeluaran, dan akses permodalan, serta kondisi ekonomi rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek kesehatan, jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan pada rumah tangga pedesaan cenderung menurun, dimana pada tahun 2013 sebanyak 43,12% menjadi sebesar 42,99% pada tahun 2014. Jenis keluhan kesehatan yang banyak dialami penduduk pedesaan adalah pilek, batuk, dan panas. Pada aspek pendidikan, indikator angka melek huruf menunjukkan bahwa sebesar 98,24% penduduk telah mampu baca tulis. Ini berarti penduduk pedesaan yang buta huruf tinggal sebesar 1,76%. Pembangunan pedesaan dari aspek ekonomi menunjukkan bahwa rumah tangga pedesaan masih mengalami keterbatasan dalam mengakses permodalan. Rumah tangga pada wilayah pedesaan di Provinsi Riau pada tahun 2014 yang mendapatkan kredit usaha sebesar 12,42%. Pengeluaran perkapita penduduk pedesaan di Provinsi Riau yaitu Rp. 673.467 per bulan pada tahun 2013 dan meningkat menjadi sebesar Rp. Rp. 756.750 per bulan pada tahun 2014. Meningkatnya pengeluaran perkapita pada wilayah pedesaan diikuti oleh menurunnya tingkat konsumsi terhadap beras murah/raskin yang turun dari 40,64% tahun 2013 menjadi sebesar 39,72% ditahun 2014.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Desa harus mampu meningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi merupakan beberapa bentuk kawasan pedesaan.

Peningkatan pembangunan pedesaan tidak cukup didorong melalui kapitalisasi akumulasi modal yang masuk ke pedesaan, namun harus diiringi dengan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2008 sebanyak 11 kabupaten/kota pada tahun 2014 meningkat menjadi sebanyak 12 kabupaten/kota. Jumlah kecamatan pada tahun 2008 sebanyak 151 kecamatan sampai dengan tahun 2014 telah dimekarkan kecamatan baru sebanyak 13 kecamatan sehingga pada tahun jumlah kecamatan di Provinsi Riau sebanyak 164 kecamatan. Pada tahun 2008 jumlah desa/kelurahan di Provinsi Riau sebanyak 1.604 desa/kelurahan dan sampai dengan tahun 2014 bertambah sebanyak 231 desa/kelurahan, sehingga jumlah desa/kelurahan pada tahun 2014 sebanyak 1.835 desa/kelurahan.

Pemekaran desa di Provinsi Riau tersebut tentunya membawa perubahan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakatnya. Demikian juga pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa meningkat, perekonomian masyarakat Desa semakin berkembang dan kesenjangan pembangunan diharapkan berkurang, serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Disisi lain, perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa semakin besar yang tercermin dari meningkatnya anggaran pembangunan yang mengalir ke desa. Sumber-sumber pendapatan desa tersebut dapat berupa pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Berdasarkan kondisi tersebut maka menjadi penting untuk diteliti tentang kondisi sosial ekonomi pembangunan pedesaan di Provinsi Riau.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pemerataan dan optimalisasi pembangunan di pedesaan merupakan titik penting untuk menekan laju migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Kota menjadi basis tujuan dan daya tarik permintaan pasar tenaga kerja, sedangkan desa kian ditinggalkan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendapatan yang diharapkan dan yang terjadi di daerah pedesaan dengan perkotaaan. Desentralisasi yang dimanifestakan dalam bentuk otonomi daerah ternyata gagal mendinamisasi perekonomian daerah. Kantung-kantung pertumbuhan ekonomi tidak terbentuk di desa-desa. Alkhudri (2011).

Kategori miskin yang banyak dikemukakan responden adalah tanah untuk rumah, pekarangan dan usaha pertanian. Dengan kata lain, penduduk yang memiliki lahan sempit atau *gurem* (<0.5 ha) sama sekali tidak memiliki tanah. Mereka adalah penduduk miskin karena tidak mampu memenuhi kesejahteraan keluarga (Sayogyo,1978). Ada 92% penduduk miskin menyatakan bahwa tanah sawah dan ladang merupakan kriteria utama. Tanah atau ladang masih dianggap harta terpenting karena menjadi jaminan sumber nafkah dan warisan bagi generasi berikutnya. Tanpa memiliki tanah maka tidak ada kepastian bagi seorang penduduk desa (petani) untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya.

Keeratan sosial merupakan bentuk kerjasama sosial untuk melakukan tindakan bersama guna mencapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama ini dalam berbagai bentuk di pedesaan. Beberapa diantaranya dapat diidentifikasi: kerjasama membangun kantor desa, kerjasama merenovasi atau membangun rumah (*rereongan*), kerjasama mengolah tanah, menanam dan memanen hasil usahatani, kerjasama memperbaiki sarana jalan dan *reciprocity* dalam bentuk acara perayaan pesta. Pattinama, (2009).

Menurut Taryono dan Ekwarso (2012) Pada umumnya wilayah pedesaan identik dengan sektor pertanian yang menghasilkan produk-produk yang bersifat inelastis, dimana perubahan permintaan terhadap produk pertanian relatif lebih kecil daripada perubahan harga. Selanjutnya menurut Purwaningsih (2008) revolusi teknologi menjadi salah satu indikasi tingkat pemerataan di tingkat pedesaan, daerah produksi padi identik dengan kesejahteraan pedesaan. Kinerja yang baik dari institusi ekonomi di tingkat desa, kelompok tani, koperasi pedesaan, sistem penyuluhan, dukungan skema pendanaan dan sistem perbankan, kesemuanya menghasilkan kinerja yang baik pada produksi pertanian.

Menurut Syahza (2011) kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan angka multiplier effect sebesar 3,03, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha. Indek kesejahteraan petani di pedesaan tahun 2003 sebesar 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani mengalami kemajuan sebesar 172 persen. Pada periode tahun 2003-2006 indek kesejahteraan petani 0,18 dan periode tahun 2006-2009 juga mengalami positif sebesar 0,12 atau kesejahteraan petani pada periode tersebut meningkat sebesar 12 persen. Pengembangan agroindustri diharapkan meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama golongan masyarakat di pedesaan. Pengembangan agroindustri diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang optimal, meningkatkan pendapatan masyarakat, (Soekartawi, 2005).

Kesenjangan pembangunan desa dan kota bukan saja terlihat dari pembangunan fisik dan ekonomi saja, akan tetapi terlihat juga antara lain pada pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, sosial, teknologi, dan juga sarana hiburan (rekreasional). Kesenjangan pembangunan 'desa'–'kota' ini pada sisi berikutnya akan memunculkan kemiskinan yang multidimensi di mana masalah kemiskinan yang muncul tidak hanya terfokus pada satu dimensi pembangunan saja, akan tetapi sudah melibatkan berbagai dimensi pembangunan, (Adi, 2005).

Di pedesaan terdapat berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat, ada masalah pendidikan, kesehatan, perekonomian, lingkungan hidup dan lain-lain. Masyarakat berharap dapat lepas dari masalah-masalah tersebut. Di desa sebenarnya terdapat berbagai potensi sumber daya, ada potensi sumber daya alam atau sumber daya lingkungan dan sumber daya manusia. Pembangunan desa mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pembangunan mencakup pribadi warganya dan lingkungannya, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, (Labombang, 2011).

Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian dan kapasitasnya untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan kelembagaan sosial ekonomi yang telah ada dan dapat dikembangkan di tingkat pedesaan dengan fokus utama adalah rumah tangga pedesaan. Pengembangan desa mandiri pangan sebagai upaya mengintegrasikan dan mengimplementasikan berbagai model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat dalam suatu desa dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat, (Husinsyah, 2009).

III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian Analisis Sosial Ekonomi Pembangunan Pedesaan di Provinsi Riau adalah meliputi desa di Provinsi Riau. Waktu penelitian ini direncanakan selama 6 bulan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data utama yang digunakan merupakan data statistik potensi desa Provinsi Riau yang bersumber dari dipublikasi Badan Pusat Statistik. Selain itu, juga digunakan data pendukung yang terkait dengan analisis sosial ekonomi pembangunan pedesaan di Provinsi Riau yang bersumber dari lembaga/instansi lainya yang mempublikasikan data terkait dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder yang dibutuhkan dikumpulkan dengan dua cara yaitu pertama dengan mendatangi langsung pihak-pihak, lembaga/instansi yang mempublikasikan data yang dibutuhkan dalam analisis sosial ekonomi pembangunan pedesaan di Provinsi Riau. Kedua pengumpulan data dilakukan melalui browsing di internet. Dengan demikian, data terkait dengan sosial ekonomi pembangunan pedesaan yang diperoleh ada dua bentuk yaitu soft copy dan hard copy.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif. Analisis desktriptif merupakan metode mengatur, merangkum, dan mempresentasikan data dengan cara yang informatif. Analisis

terhadap pembangunan pedesaan dilakukan terhadap aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial meliputi indikator pemerintahan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas dan keluarga berencana. Sedangkan aspek ekonomi meliputi indikator konsumsi dan pengeluaran, perumahan dan pemukiman, serta kondisi ekonomi rumah tangga. Selannjutnya Veriabel dari setiap indikator akan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk dilakukan analisis terkait dengan kondisi pembangunan sosial ekonomi pedesaan di Provinsi Riau.

IV. HASIL PENELITIAN

Dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terutama bagi penduduk di desa, pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanannya melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Diantara kebijakan yang ditempuh adalah melakukan penataan desa. Penataan desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa. Penataan desa dimaksud dilakukan melalui pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 8 ayat 3 disebutkan bahwa syarat pembentukan desa meliputi batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan, jumlah penduduk untuk wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa, memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung, batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa, sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik, dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau telah melakukan penataan Desa. Seiring perkembangan pembangunan wilayah, jumlah desa di Provinsi Riau terus bertambah. Pada tahun 2008 jumlah desa/kelurahan di Provinsi Riau sebanyak 1.604 desa/kelurahan, kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi sebanyak 1.655 desa/kelurahan dan sampai dengan tahun 2014 jumlah desa/kelurahan di Provinsi Riau menjadi sebanyak 1.835 desa/kelurahan.

Tabel 1 : Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Setingkat Desa di Provinsi Riau Tahun 2014

Kabupaten	Desa	Kelurahan	Jumlah
Kuantan Singingi	218	11	229
Indragiri Hulu	178	16	194
Indragiri Hilir	198	38	236
Pelalawan	104	14	118
Siak	122	9	131
Kampar	237	8	245
Rokan Hulu	147	6	153
Bengkalis	136	19	155
Rokan Hilir	167	15	182
Kep. Meranti	96	5	101
Kota Pekanbaru	0	58	58
Kota Dumai	0	33	33
RIAU	**1.603**	**232**	**1.835**

Sumber : BPS, Podes, 2014

Semakin luas suatu wilayah maka akan semakin jauh rentang kendali yang mampu dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hirarki pemerintahan yang berjenjang mulai tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan merupakan bentuk keberadaan negara dalam melayani masyarakat. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan kewenangan yang otonom kepada pemerintah desa untuk mengurus wilayahnya. Dilihat menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau menunjukkan bahwa jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kampar sebanyak 245 desa/kelurahan. Kemudian diikuti Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 236 desa/kelurahan. Sedangkan wilayah kabupaten/kota dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, masing-masing sebanyak 58 desa/kelurahan dan 32 desa/kelurahan.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut tipe topografi wilayah desa akan memberikan permasalahan dan tantangan yang berbeda setiap desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pada umumnya desa-desa yang terdapat di Provinsi Riau dengan topografi dataran yaitu 1.756 desa. Desa-desa dengan topografi lembah, lereng/puncak cenderung memiliki tantangan yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan. Di Provinsi Riau desa dengan topografi lereng/puncak sebanyak 63 desa dan di lembah sebanyak 16 Desa.

Tabel 2 : Jumlah Desa Menurut Topografi di Provinsi Riau Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Lereng/Puncak	Lembah	Dataran	Jumlah
Kuantan Singingi	9	7	213	229
Indragiri Hulu	5	3	186	194
Indragiri Hilir	6	0	230	236
Pelalawan	1	0	117	118
Siak	3	0	128	131
Kampar	20	6	219	245
Rokan Hulu	12	0	141	153
Bengkalis	5	0	150	155
Rokan Hilir	1	0	181	182
Kep. Meranti	1	0	100	101
Kota Pekanbaru	0	0	58	58
Kota Dumai	0	0	33	33
RIAU	63	16	1.756	1.835

Sumber : BPS, Podes, 2014

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

. Berdasarkan hasil penilaian pada desa sampel tahun 2014 menunjukkan bahwa sebagian besar desa-desa yang terdapat di Provinsi Riau masuk dalam kategori sangat tertinggal yaitu 233 desa dan 93 desa masuk kategori tertinggal. Sedangkan sisanya sebanyak 22 desa masuk dalam kategori berkembang dan maju, dimana masing-masing sebanyak 18 desa dan 2 desa.

Tabel 3 : Status Perkembangan Desa Sampel di Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	**Berkembang**	**Maju**	**Sangat Tertinggal**	**Tertinggal**	**Total**
BENGKALIS	2		25	4	31
INDRAGIRI HILIR	1		40	4	45
INDRAGIRI HULU	1		24	9	34
KAMPAR	6	1	18	26	51
KEPULAUAN MERANTI			32	4	36
KUANTAN SINGINGI			36	7	43
PELALAWAN		1	17	7	25
ROKAN HILIR	2	1	19	8	30
ROKAN HULU	3		8	14	25
S I A K	3	1	14	10	28
Total	**18**	**4**	**233**	**93**	**348**

Sumber : Kementerian PDT dan Transmigrasi, 2016

A. Perkembangan Pembangunan Sosial Pada Wilayah Pedesaan Di Provinsi Riau

Pada masa lalu pembangunan yang lebih terfokus pada wilayah perkotaan menjadikan pembangunan diwilayah pedesaan termarginalkan. Saat ini Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesejahteraan masyarakat juga dapat tercermin dari meningkatnya akses dan pilihan masyarakat dalam mengembangkan dan mewujudkan hidupnya yang lebih baik.

Belum seluruh masyarakat pada wilayah pedesaan di Provinsi Riau memiliki jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan. Akses masyarakat pada wilayah pedesaan di Provinsi Riau terhadap jaminan pembiayaan kesehatan cenderung berkurang. Pada tahun 2013 sebanyak 43,12% rumah tangga di pedesaan memiliki jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan. Namun demikian, pada tahun 2014 rumah tangga yang memiliki akses terhadap jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan turun menjadi sebesar 42,99%. Dilihat menurut kabupaten/kota rumah tangga pedesaan yang memiliki akses terendah terhadap jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan berada di Kabupaten Rokan Hulu dimana pada tahun 2013 yaitu 26,26% dan meningkat menjadi sebesar 27,80% pada tahun 2014. Beberapa daerah seperti Kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai akses rumah tangga yang mendapat jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan pada tahun 2014 relatif lebih rendah daripada tahun 2013.

Tabel 4 : Persentase Rumah Tangga Pedesaan Yang Memiliki Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013-2014

KABUPATEN/KOTA	2013	2014
Kuantan Singingi	37,67	42,23
Indragiri Hulu	47,76	45,10
Indragiri Hilir	43,64	40,92
Pelalawan	42,90	46,17
Siak	40,52	51,98
Kampar	42,00	53,05
Rokan Hulu	26,26	27,80
Bengkalis	48,74	32,19
Rokan Hilir	50,19	38,47
Kepulauan Meranti	80,93	76,54
Kota Pekanbaru	40,53	53,31
Kota Dumai	44,28	42,31
Provinsi Riau	**43,12**	**42,99**

Sumber : BPS, Susenas 2013 dan 2014

Tingkat kesejahteraan penduduk pedesaan yang masih lebih rendah dari penduduk perkotaan, menyebabkan kemampuan penduduk pedesaan untuk memiliki jaminan kesehatan secara mandiri masih rendah, dimana pada tahun 2014 sebesar 6,52%. Jenis jaminan pembiyaaan/ asuransi kesehatan pemerintah yang paling banyak digunakan rumah tangga pada wilayah pedesaan di Provinsi Riau pada tahun 2014 adalah JAMKESMAS sebanyak 47,50% rumah tangga dan JAMKESDA sebanyak 27,52%.

Tabel 5 : Persentase Rumah Tangga Pedesaan Di Provinsi Riau Yang Memiliki Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan Menurut Jenis Kartu Yang Digunakan Tahun 2013-2014

KABUPATEN/KOTA	2013	2014
JAMKESMAS	45,10	47,50
JAMKESDA	30,76	27,52
Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)	2,06	0,61
JPK PNS/Veteran/Pensiun	7,15	6,69
JPK Jamsostek	23,19	25,07
Jaminan Kesehatan Lainnya	2,79	6,52

Sumber : BPS, Susenas 2013 dan 2014

Pada tahun 2013 penduduk pada wilayah pedesaan yang mempunyai keluhan kesehatan sebanyak 23,73% dan meningkat menjadi sebanyak 26,25%. Jenis keluhan kesehatan yang banyak dialami oleh penduduk pada wilayah pedesaan dan cenderung meningkat adalah pilek, batuk, dan panas. Pada tahun 2013 penduduk pada wilayah pedesaan yang mempunyai keluhan panas sebanyak 38,63%, keluhan batuk sebanyak 43,79%, keluhan pilek sebanyak 41,64%. Ketiga jenis keluhan kesehatan ini mengalami peningkatan pada tahun 2014, dimana keluhan panas meningkat menjadi sebanyak 38,98%, keluhan batuk meningkat menjadi sebanyak 44,77%, dan keluhan pilek meningkat menjadi sebanyak 41,69%.

Tabel 6 : Persentase Penduduk Pada Wilayah Pedesaan Menurut Jenis Keluhan Kesehatan Di Provinsi Riau Tahun 2013-2014

Keluhan Kesehatan	2013	2014
Panas	38,63	38,98
Batuk	43,79	44,77
Pilek	41,64	41,69
Asma	4,54	5,04
Diare	4,17	5,13
Sakit Kepala	13,69	14,52
Sakit Gigi	6,01	6,19
Keluhan Kesehatan Lainnya	29,40	32,24
Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan	23,73	26,25

Sumber : BPS, Susenas 2013 dan 2014

Terbatasnya akses penduduk pada wilayah pedesaan terhadap sarana dan prasarana kesehatan, baik karena faktor jarak, sosial, ekonomi dan lain sebagainya menyebabkan berobat sendiri masih menjadi pilihan berobat yang banyak dilakukan oleh penduduk di pedesaan. Pada tahun 2013 penduduk pedesaan di Provinsi Riau yang memilih berobat sendiri sebanyak 68,23%. Pola berobat sendiri pada penduduk pedesaan cenderung menurun, dimana pada tahun 2014 menjadi sebanyak 64,25%. Hal ini seiring meningkatnya kesadaran penduduk dipedesaan akan pentingnya pelayanan kesehatan yang rasional. Kondisi ini juga menyebabkan pelayanan berobat jalan menjadi meningkat yaitu dari 38,34% tahun 2013 menjadi sebesar 41,44% ditahun 2014.

Tabel 7 : Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan dan Berobat Sendiri Pada Wilayah Pedesaan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013-2014

KABUPATEN/KOTA	2013		2014	
	Berobat Jalan	Berobat Sendiri	Berobat Jalan	Berobat Sendiri
Kuantan Singingi	62,53	57,64	54,41	56,14
Indragiri Hulu	30,61	69,61	40,38	61,14
Indragiri Hilir	24,04	80,96	28,69	76,00
Pelalawan	31,50	81,42	43,35	64,56
Siak	41,46	55,80	56,36	42,08
Kampar	46,16	65,02	54,05	57,28
Rokan Hulu	30,56	74,30	33,24	75,29
Bengkalis	46,92	42,61	40,12	55,31
Rokan Hilir	43,92	64,24	41,43	66,49
Kepulauan Meranti	39,17	74,39	39,79	60,56
Kota Pekanbaru	38,69	56,29	44,85	59,26
Kota Dumai	31,71	72,20	42,32	63,48
Provinsi Riau	**38,34**	**68,23**	**41,44**	**64,25**

Sumber : BPS, Susenas 2013 dan 2014

Sarana dan prasarana kesehatan yang paling dekat dengan tempat tinggal dan mudah diakses penduduk pada wilayah pedesaan sebagian besar adalah puskesmas pembantu dan puskesmas. Sehingga pada penduduk pedesaan untuk berobat jalan banyak memanfaatkan fasilitas puskesmas pembantu dan puskesmas, serta petugas kesehatan yang tersedia. Sedangkan untuk berobat sendiri pada umumnya penduduk pedesaan telah memilih pengobatan modern. Selain itu masih ada yang memilih pengobatan alternatif secara tradisional.

Tabel 8 : Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan dan Berobat Sendiri Pada Wilayah Pedesaan Menurut Tempat/Cara Berobat Di Provinsi Riau Tahun 2013-2014

Tempat/Cara Berobat	2013	2014
Berobat Jalan		
Rumah Sakit Pemerintah	4,27	4,76
Rumah Sakit Swasta	5,32	5,13
Praktek Dokter/Poliklinik	24,62	27,04
Puskesmas/Pustu	34,98	29,90
Petugas Kesehatan	33,00	34,31
Praktek Batra	3,79	3,90
Dukun Bersalin	0,57	0,65
Lainnya	2,68	4,00
Berobat Sendiri		
Tradisional	28,77	24,78
Modern	89,86	89,55
Lainnya	2,35	2,69

Sumber : BPS, Susenas 2013 dan 2014

Rata-rata jumlah anak lahir hidup per wanita berumur 15-49 tahun pada wilayah pedesaan cenderung menurun, dimana pada tahun 2013 sebesar 2,00 dan pada tahun 2014 menjadi sebesar 1,96. Data ini tidaklah dapat diartikan bahwa tingkat kematian anak yang dilahirkan dipedesaan meningkat. Sebaliknya, meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran akan kesehatan reproduksi bagi wanita usia subur di wilayah pedesaan menyebabkan pada wanita berumur 15 – 49 tahun yang menikah diusia muda semakin berkurang. Sehingga tingkat kelahiran hidup pada wanita usia 15-49 tahun menjadi menurun.

Tabel 9 : Rata-rata Jumlah Anak Lahir Hidup Per Wanita Berumur 15-49 Tahun Pada Wilayah Pedesaan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013-2014

KABUPATEN/KOTA	**2013**	**2014**
Kuantan Singingi	2,04	1,90
Indragiri Hulu	1,91	1,87
Indragiri Hilir	1,90	1,85
Pelalawan	2,03	2,02
Siak	1,94	1,81
Kampar	1,97	1,88
Rokan Hulu	2,09	2,12
Bengkalis	1,93	2,04
Rokan Hilir	2,10	2,09
Kepulauan Meranti	1,98	2,04
Kota Pekanbaru	2,17	1,67
Kota Dumai	2,15	2,05
Provinsi Riau	**2,00**	**1,96**

Sumber : BPS, Susenas 2013 dan 2014

Penduduk 10 tahun keatas yang memilih memutuskan untuk bersekolah pada wilayah pedesaan di Provinsi Riau cenderung meningkat. Pada tahun 2013 sebesar 21,80% dan meningkat menjadi sebesar 22,56% ditahun 2014. Meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas diri dalam mencapai kehidupan yang lebih baik pada masyarakat pedesaan telah mendorong menurunnya pilihan menjadi angkatan kerja. Hal ini terlihat dari menurunnya penduduk yang tidak bersekolah lagi turun dari 75,40% tahun 2013 menjadi 74,30% ditahun 2014.

Tabel 10 : Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Pada Wilayah Pedesaan Menurut Status Pendidikan Di Provinsi Riau Tahun 2013-2014

Keterangan	2013	2014
Tidak/Belum Pernah Sekolah	2,80	3,14
Masih Bersekolah	21,80	22,56
SD/MI	9,13	9,22
SMP/MTs	6,77	6,98
SMA/SMK/MA	4,46	4,74
Diploma I s.d Universitas	1,44	1,62
Tidak Bersekolah Lagi	75,40	74,30

Sumber : BPS, Susenas 2013 dan 2014

Angka melek huruf penduduk pedesaan di Provinsi Riau terus meningkat, dimana pada tahun 2013 sebesar 97,29% dan menjadi sebesar 98,24% pada tahun 2014. Ini menunjukkan bahwa pada wilayah pedesaan di Provinsi Riau penduduk yang buta hufur masih ada sebesar 1,76%. Kondisi ini akan membatasi pola pikir dan kemampuan mereka dalam meningkatkan kapasitasnya.

Tabel 11 : Angka Melek Huruf Pada Wilayah Pedesaan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013-2014

KABUPATEN/KOTA	**2013**	**2014**
Kuantan Singingi	97,21	98,18
Indragiri Hulu	97,25	98,03
Indragiri Hilir	97,54	98,97
Pelalawan	95,97	96,34
Siak	97,13	97,82
Kampar	97,58	98,44
Rokan Hulu	98,28	99,11
Bengkalis	96,84	97,29
Rokan Hilir	97,18	98,14
Kepulauan Meranti	94,68	97,31
Kota Pekanbaru	99,05	100,00
Kota Dumai	98.72	99,63
Provinsi Riau	**97,29**	**98,24**

Sumber : BPS, Susenas 2013 dan 2014

B. Perkembangan Pembangunan Ekonomi Pada Wilayah Pedesaan Di Provinsi Riau

Kehidupan pada wilayah pedesaan sangat identik dengan pembangunan sektor pertanian. Nilai tambah sektor pertanian yang masih relatif lebih rendah dibandingkan sektor lainnya dan ketidakpastian usaha yang lebih tinggi menyebabkan pada umumnya usaha disektor pertanian menjadi kurang bankable. Rumah tangga pedesaan di Provinsi Riau yang mendapatkan kredit usaha masih relatif rendah walaupun cenderung meningkat. Rumah tangga pada wilayah pedesaan di Provinsi Riau yang mendapatkan kredit usaha pada tahun 2013 sebesar 10,78% dan meningkat menjadi sebesar 12,42% pada tahun 2014.

Tabel 12 : Persentase Rumah Tangga Pedesaan yang Mendapatkan Kredit Usaha Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013-2014

KABUPATEN/KOTA	2013	2014
Kuantan Singingi	14,76	12,83
Indragiri Hulu	10,90	13,27
Indragiri Hilir	3,53	6,04
Pelalawan	16,60	17,28
Siak	8,10	7,67
Kampar	10,55	10,30
Rokan Hulu	18,32	22,54
Bengkalis	11,47	14,24
Rokan Hilir	5,87	6,75
Kepulauan Meranti	15,52	27,89
Kota Pekanbaru	22,02	0,04
Kota Dumai	8,75	12,27
Provinsi Riau	**10,78**	**12,42**

Sumber : BPS, Susenas 2013 dan 2014

Rendahnya sumber modal usaha, baik yang bersumber dari kredit maupun modal sendiri menyebabkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasarnya menjadi semakin terbatas. Walaupun cenderung meningkat persentase rumah tangga yang mendapatkan kredit usaha pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013, namun beberapa kabupaten di Provinsi Riau masyarakat pedesaannya masih jauh dari akses kredit usaha. Misanya rumah tangga pedesaan di Kabupaten Indragiri Hilir yang mendapatkan akses terhadap kredit usaha hanya sebesar 6,04%, Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 6,75%, dan Kabupaten Siak sebesar 7,67%. Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan rumah tangga pedesaan menjadi *bankable*.

Tabel 13 : Persentase Rumah Tangga Pedesaan Di Provinsi Riau Yang Mendapatkan Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Yang Diterima Tahun 2013-2014

Jenis Kredit	2013	2014
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	18,30	19,47
Program pemerintah selain PNPM	12,18	8,89
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	12,49	11,51
Program Bank Selain KUR	30,39	27,61
Program Koperasi	14,46	14,06
Perorangan	7,27	6,39
Lainnya	15,48	20,38

Sumber : BPS, Susenas 2013 dan 2014

Ketidakberdayaan rumah tangga pedesaan juga terlihat dari ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan pokok utama yaitu beras. Kelompok rumah tangga berpendapatan rendah pada wilayah pedesaan di Provinsi Riau merupakan kelompok yang paling merasakan dampaknya mengingat hampir sebagian besar pendapatan mereka habis dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Sehingga adanya program beras murah/raskin menjadi pilihan konsumsi untuk tetap bertahan hidup.

Tabel 14 : Persentase Rumah Tangga Pedesaan Yang Pernah Membeli Beras Murah/ Raskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013-2014

KABUPATEN/KOTA	**2013**	**2014**
Kuantan Singingi	32,72	31,77
Indragiri Hulu	41,60	36,85
Indragiri Hilir	50,46	46,42
Pelalawan	33,54	23,29
Siak	11,70	16,41
Kampar	48,47	49,64
Rokan Hulu	39,65	36,45
Bengkalis	19,08	32,23
Rokan Hilir	49,09	54,66
Kepulauan Meranti	82,05	65,81
Kota Pekanbaru	8,98	32,81
Kota Dumai	23,29	12,19
Provinsi Riau	**40,64**	**39,72**

Sumber : BPS, Susenas 2013 dan 2014

Rumah tangga pedesaan di Provinsi yang mengkonsumsi beras murah/raskin relatif turun pada tahun 2014 yaitu 40,64% dan menjadi sebesar 39,72%. Penurunan konsumsi beras murah/raskin ini tidaklah terjadi pada seluruh wilayah pedesaan di Provinsi Riau. Lebih ironis lagi konsumsi beras murah/raskin yang meningkat terutama terjadi pada wilayah yang dikenal sebagai lumbung pangan di Provinsi Riau. Di Kabupaten Siak penduduk pedesaan yang mengkonsumsi beras murah/raskin meningkat dari 11,70% ditahun 2013 menjadi sebesar 16,41% tahun 2014. Rumah tangga di Kabupaten Kampar dari sebesar 48,47% tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 49,64% tahun 2014. Bengkalis dari 19,08% tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 32,23%.

Belum seluruh rumah tangga dapat menikmati listrik sebagai sumber penerangan. Pada tahun 2014 rumah tangga pedesaan yang menikmati listrik PLN sebesar 59,91% dan listrik non PLN sebesar 31,78%. Sisanya sebanyak 8,31% memanfaatkan petromak, pelita/sentir/obor, dan lainnya sebagai sumber penerangannya.

Tabel 15 : Persentase Rumah Tangga Pada Wilayah Pedesaan Menurut Sumber Penerangan Di Provinsi Riau Tahun 2013-2014

KABUPATEN/KOTA	2013	2014
Listrik PLN	52,85	59,91
Listrik Non PLN	38,14	31,78
Petromak	0,28	0,61
Pelita/Sentir/Obor	8,53	7,32
Lainnya	0,20	0,38

Sumber : BPS, Susenas 2013 dan 2014

Tingkat kemakmuran masyarakat pedesaan pada tahun 2014 relatif mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 rata-rata pengeluaran perkapita penduduk pedesaan di Provinsi Riau sebesar Rp. 756.750 per bulan lebih tinggi dari tahun 2013 yaitu Rp. 673.467 per bulan. Dilihat menurut wilayah menunjukkan bahwa penduduk wilayah pedesaan di Kabupaten pelalawan memiliki pengeluaran perkapita tertinggi yaitu sebesar Rp. 1.023.413 per bulan pada tahun 2014 walaupun terjadi sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu Rp. 1.048.090 per bulan. Pengeluaran perkapita terendah di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Rp. 624.787 per bulan pada tahun 2014.

Tabel 16 : Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Pada Wilayah Pedesaan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013-2014

KABUPATEN/KOTA	2013	2014
Kuantan Singingi	820.663	867.262
Indragiri Hulu	653.625	773.598
Indragiri Hilir	554.712	734.422
Pelalawan	1.048.090	1.023.413
Siak	693.859	837.707
Kampar	648.999	715.208
Rokan Hulu	615.253	692.291
Bengkalis	599.669	667.519
Rokan Hilir	687.398	686.445
Kepulauan Meranti	471.734	624.787
Kota Pekanbaru	942.694	1.053.957
Kota Dumai	700.279	812.002
Provinsi Riau	**673.467**	**756.720**

Sumber : BPS, Susenas 2013 dan 2014

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembangunan sosial pedesaan antara lain dapat dilihat dari indikator kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan indikator kesehatan menunjukkan bahwa jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan pada rumah tangga pedesaan cenderung menurun, dimana pada tahun 2013 sebanyak 43,12% menjadi sebesar 42,99% pada tahun 2014. Jenis keluhan kesehatan yang banyak dialami oleh penduduk pada wilayah pedesaan dan cenderung meningkat adalah pilek, batuk, dan panas. Pada aspek pendidikan, indikator angka melek huruf menunjukkan bahwa sebesar 98,24% penduduk telah mampu baca tulis. Ini berarti penduduk pedesaan yang buta huruf tinggal sebesar 1,76%.
2. Pembangunan pedesaan dari aspek ekonomi menunjukkan bahwa rumah tangga pedesaan masih mengalami keterbatasan dalam mengakses permodalan. Rumah tangga pada wilayah pedesaan di Provinsi Riau pada tahun 2014 yang mendapatkan kredit usaha sebesar 12,42%. Seiring meningkatnya pengeluaran perkapita penduduk pedesaan di Provinsi Riau yaitu Rp. 673.467 per bulan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp. Rp. 756.750 per bulan pada tahun 2014. Meningkatnya pengeluaran perkapita pada wilayah pedesaan diikuti oleh menurunnya tingkat konsumsi terhadap beras murah/raskin yang turun dari 40,64% tahun 2013 menjadi sebesar 39,72% ditahun 2014.

B. Saran

1. Kertebatasan akses rumah tangga pedesaan terhadap jaminan pembia-yaan/asuransi kesehatan merupakan bentuk ketidakberdayaan penduduk pedesaan terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik. Walaupun pemerintah telah membuat kebijakan jaminan kesehatan nasional, namun keterbatasan pengetahuan dan informasi dan jauhnya jarak dari pusat pelayanan membuat masyakat pedesaan relatif kurang tersentuh oleh program pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, alokasi dana desa yang mengalir ke wilayah pedesaan diharapkan dapat menyentuh aspek pemberdayaan sosial masyarakat pedesaan termasuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat desa.
2. Dalam upaya meningkatkan akses terhadap kredit usaha bagi rumah tangga di pedesaan pemerintah diharapkan dapat terus memberikan jaminan, pendampingan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap usaha-usaha yang berkembang dipedesaan hingga akhirnya mereka mampu menjadi bankable.

DAFTAR PUSTAKA

Adi I.R., 2005. Kemiskinan Multidimensi. Akara, Sosial Humaniora, Vol. 9, NO. 1, Juni 2005: 27-33

Alkhudri A. T, 2011. Mudik sebagai fenomena kultural kependudukan. Jurnal Sosialita, Volume 9 Nomor 1 Juni 2011 : 50 -59

Husinsyah, 2009. Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Masyarakat Di Desa Birang Kec. Gunung Tabur Kabupaten Berau. Jurnal EPP.Vol.6.No.2.2009.16-25

Labombang, M. 2011. Dampak Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pada Program PNPM Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Toli Toli. Jurnal *MEKTEK Tahun XIII No. 1, Januari 2011*

Pattinama M. J, 2009. Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal. Jurnal MAKARA, Sosial Humaniora, Volume 13 Nomor 1, Juli 2009 : hlm. 1-12

Purwaningsih Y, 2008. Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 9, No. 1, Juni 2008, hlm. 1 – 27.

Soekartawi. 2005. Agroidustri dalam Perspektif Sosial Ekonomi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Taryono, Ekwarso H. 2012. Analisis Ketenagakerjaan Pada Wilayah Pedesaan Di Kabupaten Kampar. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun III No. 7, November 2012. Hlm. 1 – 23